

ABSTRAK

Kurnia Harianto (14052046/2014) : Implementasi Kebijakan Program

Relawan Demokrasi oleh KPU Kota

Padang (Studi Pada Pilkada 2018)

Jumlah pemilih pada pemilihan umum (Pemilu) pascareformasi cenderung menurun. Realita tersebut membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengambil kebijakan Relawan Demokrasi (Relasi) yang pengelolanya berada di KPU di level Kota atau Kabupaten. Tujuan utama dari kebijakan Relawan Demokrasi adalah meningkatkan partisipasi pemilih. Di Kota Padang, kebijakan Program tersebut dinilai berhasil. Ini dapat dilihat dari partisipasi pemilih pada pilkada 2013 yang hanya sekitar 52%, menurun dari pilkada 2008 dimana tingkat partisipasi masyarakat Kota Padang sekitar 56% dan kemudian pada pilkada 2018 di mana terdapat kebijakan Relawan Demokrasi tingkat partisipasi masyarakat naik 12% dengan tingkat partisipasi 64%. Hal tersebut dapat secara ilmiah diteliti tentang bagaimana implementasi program relawan demokrasi oleh KPU pada Pilkada Kota Padang 2018 jika dilihat dari faktor-faktor keberhasilannya. Metode penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian didapat bahwa implementasi kebijakan program relawan demokrasi di KPU pada Pilkada Kota Padang terdapat faktor keberhasilan seperti komunikasi yang sudah efektif, sumber daya relawan demokrasi yang mencukupi, walaupun anggarannya terbatas, disposisi, dimana para relawan demokrasi memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan program ini, dan struktur birokrasi, KPU memiliki standar operasional (SOP) dan tugas pokok yang jelas. Tujuan penelitian adalah sebagai salah satu evaluasi dalam kebijakan yang diambil KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu.

Kata Kunci: Implementasi, Relawan Demokrasi, Pilkada 2018